

BAB 2

PERAN JEPANG DI ASEAN DAN PROSES KERJASAMA REGIONAL ASIA

2.1 Peran Politik Jepang di ASEAN

Hubungan Jepang-ASEAN memasuki babak baru saat Perdana Menteri Takeo Fukuda mendeklarasikan Fukuda Doktrin pada tahun 1977. Kebijakan Fukuda Doktrin menurut Michael Yuhuda merupakan inisiatif pertama Jepang yang paling ambisius setelah berakhirnya Perang Dunia II.¹ ASEAN tidak saja ditempatkan sebagai kawasan paling penting bagi Jepang, tetapi juga sebagai “lahan” strategis Jepang untuk memainkan peranannya sebagai pemimpin Asia. Bab ini akan membahas mengenai kedekatan hubungan Jepang-ASEAN yang dianalisa berdasarkan peran politik dan ekonomi Jepang di ASEAN.²

Peran politik Jepang di ASEAN dimulai ketika terjadi konflik Indo-China. Jepang banyak melibatkan diri membantu rekonstruksi negara-negara Indo-China yang diantaranya: *pertama*, mengirimkan 1800 personil tentaranya untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang ditempatkan didaerah konflik. *Kedua*, Jepang ikut memainkan peran penting sebagai mediator dalam proses penarikan pasukan Vietnam di Kamboja. *Ketiga*, Jepang mengajak pemerintah Vietnam untuk berdialog dan menjanjikan sejumlah bantuan ekonomi, asalkan Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja.³

¹ Michael Yuhuda, *The International Politics of Asia-Pacific: 1945-1955*, London: Routledge, 1996, hlm 243.

² Secara umum, suatu negara ketika menjalin hubungan dengan negara lain akan membentuk kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Mengingat pasal sembilan konstitusi Jepang melarangnya untuk menggunakan kekuatan militer, maka Jepang menghindari segala bentuk peran militernya di ASEAN. Lihat Hitoshi Tanaka, “Japan’s Policy Agenda for East Asia”, *East Asia Insight*, Vol. 2, No. 41, 2008, hlm 2.

³ Sueo Sudo, “Japan-ASEAN Relations: New Dimensions in Japanese Foreign Policy”, *Asian Survey*, Vol. 28, No. 5, Mei 1988, hlm 512-515.

Konflik Indo-China memang cukup menyita perhatian Jepang. Sebagai aliansi strategis AS, Jepang dituntut ikut memainkan strategi Perang Dingin AS melawan komunisme Uni Soviet. Untuk itulah Jepang membutuhkan ASEAN sebagai *balance of power* dalam upaya mencegah masuknya ajaran komunisme Uni Soviet yang dibawa Vietnam ke kawasan Asia. Seperti yang tertuang dalam salah satu poin Fukuda Doktrin yang isinya “Jepang akan bekerjasama dengan ASEAN menyelesaikan permasalahan di Indo-China”.

Misi Jepang dalam penyelesaian masalah Indo-China sangat terkait dengan upayanya menjaga ASEAN bebas dari pengaruh komunis dan menciptakan stabilitas politik regional. Dengan begitu, Jepang dapat fokus memajukan perekonomiannya yang selama ini membutuhkan ASEAN sebagai sumber bahan mentah industri Jepang, pangsa pasar produk-produk Jepang, tempat investasi, dan jalur perdagangan maritim Jepang.

Dalam salah satu isi Fukuda Doktrin, juga terdapat poin “*heart-to-heart understanding*”. Landasan Jepang mengeluarkan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa demonstrasi “anti Jepang” saat kunjungan Perdana Menteri Kakuei Tanaka ke negara-negara ASEAN pada tahun 1974. Demonstrasi yang berujung pada kerusuhan ini merupakan bentuk penolakan masyarakat ASEAN atas dominasi perekonomian Jepang di negaranya. Para demonstran menilai Jepang menjajah ASEAN dalam bentuk baru melalui banyaknya aliran modal Jepang yang masuk ke negara-negara ASEAN. Jepang juga dinilai hanya ingin mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara ASEAN untuk kepentingan industrinya.

Pandangan buruk yang mereka tujukan ke Jepang direspon oleh Perdana Menteri Fukuda melalui pendekatan *heart-to-heart understanding*. Fukuda mengajak perusahaan-perusahaan Jepang di ASEAN untuk diberi suatu panduan perilaku (*code of conduct*) agar dapat menyatu dengan masyarakat setempat, memberikan kontribusi ke negara tujuan bisnisnya, dan berbagi kemakmuran. Hal ini dimaksudkan agar kerusuhan yang berujung pada pembakaran produk-produk buatan Jepang seperti mobil, motor dan sepeda tidak akan berulang. Karena, kerusuhan ini tidak saja membawa dampak buruk dari hubungan Jepang-ASEAN

tetapi telah menyebabkan banyaknya korban Jiwa yang meninggal maupun luka parah.

2.2 Peran Ekonomi Jepang di ASEAN

Dalam kebijakan luar negeri Jepang, dikenal istilah adanya pemisahan antara politik dan ekonomi (*seikei-bunri*). *Seikei-bunri* mengandung arti bahwa peran politik Jepang di ASEAN sangat terkait dengan kepentingan ekonomi Jepang.⁴

ASEAN selama ini telah dipersiapkan Jepang sebagai kawasan tujuan ekspor, tujuan investasi, dan sumber bahan baku bagi industri Jepang.⁵ Semua aspek-aspek tersebut, mendasari Jepang untuk lebih meningkatkan peran ekonominya dalam perdagangan, bantuan pembangunan pemerintah (*Official Development Aid /ODA*), dan sumber investasi langsung (*Foreign Direct Investment /FDI*). Ketiga elemen diatas, telah membawa Jepang menjadi salah satu mitra dagang utama bagi ASEAN, sumber terbesar ODA dan sumber FDI.

2.2.1 Perdagangan

Hubungan perdagangan antara Jepang dengan negara-negara ASEAN telah berlangsung jauh sebelum ASEAN dibentuk. Adapun yang melatar belakangi hubungan dagang Jepang-ASEAN antara lain: **Pertama**, untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dan energi. Sebagai negara yang berbasis industri, Jepang sangat miskin akan sumber daya industrial. Untuk itu, Jepang memerlukan pasokan produk-produk pertambangan yang banyak terdapat di negara-negara ASEAN. **Kedua**, keinginan Jepang untuk mengembangkan wilayah pemasaran hasil industrinya. Negara-negara ASEAN yang cakupan wilayahnya begitu luas menjadi pasar yang potensial bagi Jepang. Selama ini, negara-negara ASEAN merupakan pelanggan utama dari produk-produk buatan Jepang seperti

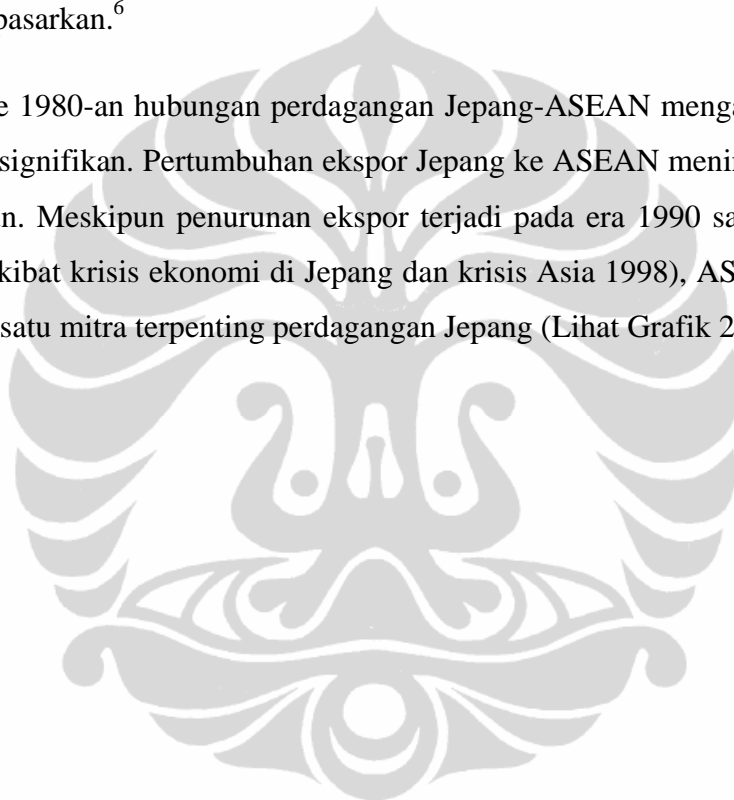
⁴ Ana Monica Pop, "Japan ASEAN Relations in the context of Globalization", *International Journal of Bussiness Research*, 2007, dalam http://findarticles.com/p/articles/mi_6773/is_6_7/ai_n28522947, (diunduh pada tanggal 12 Mei 2008, pukul 16:06 WIB).

⁵ *Op. Cit*, hlm 53

elektronik, peralatan, permesinan, maupun kendaraan dalam jumlah besar. Konsistensi produk-produk Jepang dengan harga terjangkau dan berkualitas tinggi, menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen di negara-negara Asia.

Meningkatnya upah buruh dan mahalnya biaya produksi domestik menjadi alasan Jepang untuk merelokasi industrinya dan membuka MNC (*Multinational Corporation*) di sejumlah negara-negara ASEAN. Tujuannya agar upah buruh dan biaya produksi menjadi lebih murah sehingga produk buatan Jepang semakin kompetitif untuk dipasarkan.⁶

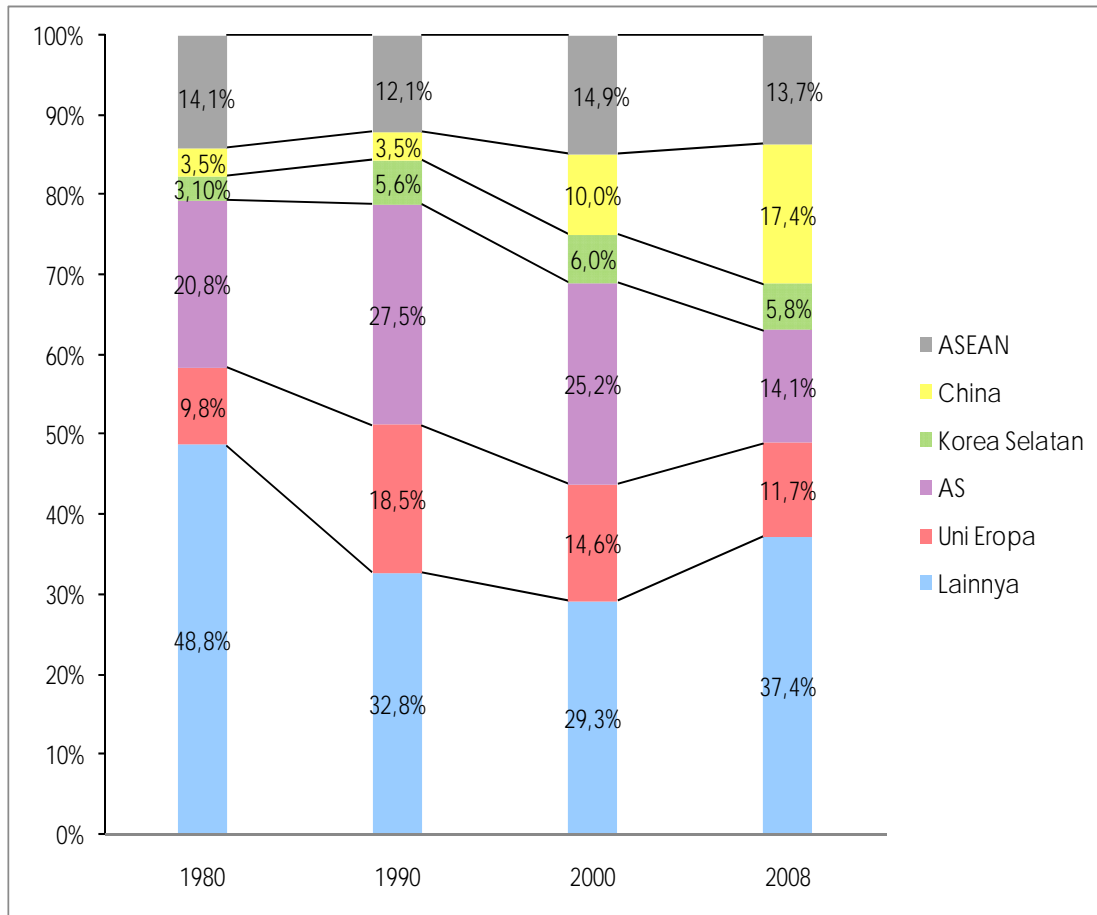
Pada periode 1980-an hubungan perdagangan Jepang-ASEAN mengalami peningkatan secara signifikan. Pertumbuhan ekspor Jepang ke ASEAN meningkat sebesar 7% pertahun. Meskipun penurunan ekspor terjadi pada era 1990 sampai 2000-an, (sebagai akibat krisis ekonomi di Jepang dan krisis Asia 1998), ASEAN tetap menjadi salah satu mitra terpenting perdagangan Jepang (Lihat Grafik 2.1).



⁶ Selain itu, relokasi industri Jepang ke ASEAN juga dikarenakan adanya tekanan AS yang menghendaki Jepang untuk mengurangi surplus perdagangannya dengan AS. Lihat Syamsul Hadi, *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2005, hlm 17.

Grafik 2.1

Mitra Utama Perdagangan Jepang



Sumber: IMF, 2009

2.2.2 Official Development Aid (ODA)

Bantuan pemerintah Jepang atau yang biasa dikenal dengan sebutan ODA merupakan kebijakan Perdana Menteri Hayato Ikeda (1960-1964). Sejak era 1960-an, ODA Jepang telah memberikan bantuan ke berbagai negara berupa bantuan luar negeri (tanpa kompensasi) dan pinjaman. Bantuan tanpa kompensasi diberikan untuk *human security*, bencana, dan bantuan budaya. Sedangkan pinjaman diberikan untuk pembangunan infrastruktur.⁷ Kontribusi ODA Jepang

⁷ Untuk lihat skema ODA lihat “Japan’s Official Development Assistance White Paper 2009”, <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/White/2009/html/honbun/b0/enjo.html>, (diunduh pada 29 April 2010)

begitu efektif untuk mempromosikan kepentingan ekonominya di kawasan. Secara perlahan namun pasti, ODA menjadi instrumen paling penting dalam dalam kebijakan luar negeri Jepang dan menempatkannya menjadi salah satu pendonor terbesar di dunia.⁸

Terdapat empat karakteristik dalam melihat bantuan ODA Jepang, **Pertama**, dibandingkan dengan pendonor global lainnya, porsi terbesar dari total bantuan ODA Jepang diberikan dalam bentuk pinjaman langsung (*direct loan*). **Kedua**, pinjaman langsung ini dikaitkan dengan syarat membeli barang dan jasa dari Jepang. **Ketiga**, distribusi bantuan ODA Jepang lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan pembangkit tenaga listrik. **Keempat**, secara target regional, 60-70 % diberikan untuk kawasan Asia.⁹

Pemberian ODA Jepang diberikan melalui dua cara, yakni bilateral dan multilateral. Sejak pertengahan awal tahun 1960, ODA Jepang telah menyalurkan bantuan secara bilateral ke negara-negara ASEAN sejumlah US\$200-400 juta dan meningkat tajam menjadi US\$1,3 miliar diakhir periode. Pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Jepang pertama, Perdana Menteri Fukuda juga memberikan bantuan keuangan sejumlah US\$1 miliar untuk negara-negara ASEAN guna menstabilisasi perekonomian negara-negara ASEAN sekaligus mencegah masuknya pengaruh komunis China, khususnya di Burma (Myanmar) dan Indonesia.¹⁰

ODA Jepang juga disalurkan secara multilateral. Diantaranya melalui organisasi internasional PBB, seperti UNDP, UNEP, UNHCR, maupun melalui institusi finansial: ADB, IMF, World Bank, APEC, OECD) (Lihat Tabel 2.1).

⁸ Qingxin Ken Wang, "Recent Japanese Economic Diplomacy in China: Political Allignment in a Changing World Order", *Asian Survey*, Vol. 33, No. 6, 1993, hlm 631.

⁹ *Ibid*, hlm 632

¹⁰ Tomotaka Shoji, "Pursuing a Multi-dimensional Relationship: Rising China and Japan's Southeast Asia Policy", hlm 160.

Tabel 2.1

Dana ODA yang Disalurkan Secara Multilateral

Kategori \ Tahun	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Bantuan melalui lembaga multilateral:	813,3	1.598,4	1.025,2	1.047,8	1.152,2	1.523,9	1.378,4	807,1	1.221,7	897,7
a. PBB	727,7	1.304,3	844,1	832,1	865,7	1.242,8	1.070,8	587,7	556,7	581,0
b. Lainnya	85,6	294,1	181,1	215,7	286,5	281,1	307,6	219,4	665,0	316,8
2. Pendanaan melalui institusi multilateral:	913,6	2.180,2	1.422,8	1.585,5	1.472,3	1.541,2	1.420,5	3.070,8	685,7	1.862,0
a. World Bank	268,0	1.152,9	871,0	1.123,5	916,5	1.034,9	896,9	2.575,6	172,7	1.253,3
b. Lainnya	645,6	1.027,3	551,8	462,0	555,8	506,3	523,6	495,2	513,0	608,7
Total	1.726,9	3.778,7	2.448,1	2.633,3	2.624,5	3.065,1	2.798,9	3.877,9	1.907,4	2.759,7
Rasio terhadap total ODA	13,9	27,7	24,3	27,9	28,7	33,7	20,8	34,8	24,8	29,3

Sumber: ODA *White Paper*, 2009

Jumlah bantuan yang diberikan Jepang ke berbagai lembaga internasional biasanya termasuk dalam ranking lima besar. Bahkan untuk lembaga ekonomi seperti World Bank dan IMF, kontribusi Jepang menempati peringkat kedua setelah AS. Sedangkan di lembaga kerjasama regional ADB, Jepang menjadi penyedia modal utama, menunjukkan fokus dan perhatian khusus Jepang ke wilayah Asia. Peran Jepang di berbagai lembaga internasional menunjukkan posisi Jepang sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia.¹¹

Negara-negara ASEAN menerima bantuan terbesar dari ODA Jepang. Dari total keseluruhan dana ODA sejumlah US\$7.5 milyar pada tahun 2001,

¹¹ <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/index.html> (diunduh pada 3 Juni 2010)

US\$2.1 milyar diberikan untuk ASEAN.¹² Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia mendapat bagian terbesar dari ODA Jepang. Pada tahun 2009, sekitar 43% pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia bersumber dari Jepang. Mengingat pembiayaan utang Indonesia dari ADB¹³ (16,8%) dan *World Bank* (10,8%) juga banyak bersumber dari Jepang, dapat diyakini sekitar 50% utang luar negeri Indonesia bersumber dari Jepang. Sedangkan AS yang sering dianggap mendominasi Indonesia, hanya memberi kontribusi 3,7% dari total utang luar negeri pemerintah Indonesia.¹⁴

2.2.3 Foreign Direct Investment (FDI)

Selain menerima bantuan terbesar dari ODA Jepang, ASEAN juga dipersiapkan sebagai kawasan tujuan investasi. Perusahaan-perusahaan Jepang telah menanamkan FDI nya dalam skala besar ke negara-negara ASEAN sejak 1972. Pada tahun 2001, dari total nilai investasi sejumlah 6,8 triliun Yen Jepang di Asia Timur dan Asia Tenggara, 57,1% nya atau 3,9 triliun Yen berada di ASEAN, dan sisanya sekitar 21,5% untuk China Daratan.¹⁵

Pada tahun 2004-2008, dari total FDI negara-negara di luar ASEAN, Jepang memberikan kontribusi paling besar. Bahkan, FDI Jepang jumlahnya dua kali lipat lebih besar dari FDI AS di ASEAN (Lihat Tabel 2.2).

¹² Japan Times, "Tokyo-ASEAN Summit Set to Further Relations", 11 Desember 2003.

¹³ ODA Jepang yang disalurkan melalui institusi multilateral seperti ADB dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Misalnya membangun sektor infrastruktur sosial (seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih), infrastruktur ekonomi (transportasi, komunikasi), sektor produksi (pertanian, perdagangan, industri konstruksi) dan sektor-sektor lainnya.

¹⁴ Sumber: Depkeu, 2009, <http://www.dmo.or.id> (diunduh pada 16 Desember 2009).

¹⁵ Japan Times, "Tokyo-ASEAN Summit Set to Further Relations", 11 Desember 2003.

Tabel 2.2

Sepuluh Negara Dengan FDI Terbesar ke ASEAN

(nilai dalam Dolar AS Juta; porsi dalam persen)

Negara/kawasan	Nilai				Porsi terhadap Total Arus FDI			
	2006	2007	2008	2006-2008	2006	2007	2008	2006-2008
Uni Eropa	10,672.2	18,481.0	13,057.3	42,210.5	19.4	26.4	21.9	22.9
ASEAN	7,596.0	9,461.7	10,831.0	27,888.7	13.8	13.5	18.1	15.1
Jepang	10,229.6	8,382.0	7,156.9	25,768.5	18.6	12.0	12.0	14.0
AS	3,418.5	6,345.6	3,012.5	12,776.6	6.2	9.1	5.0	6.9
Negara Kepulauan Cayman	3,514.1	787.2	2,537.0	6,838.3	6.4	1.1	4.2	3.7
Amerika Tengah dan Selatan	3,720.0	2,109.5	957.4	6,787.0	6.8	3.0	1.6	3.7
Bermuda	1,324.9	2,777.7	2,122.1	6,224.8	2.4	4.0	3.6	3.4
Korea Selatan	1,253.8	3,035.0	1,588.7	5,877.4	2.3	4.3	2.7	3.2
China	1,016.2	1,574.4	1,437.2	4,027.7	1.8	2.3	2.4	2.2
Hong Kong	1,278.8	1,671.3	712.2	3,662.3	2.3	2.4	1.2	2.0
Total Sepuluh Negara Terbesar	44,024.2	54,625.4	43,412.1	142,061.7	80.1	78.1	72.7	76.9
Lainnya	10,955.7	15,313.4	16,288.7	42,557.7	19.9	21.9	27.3	23.1
Total FDI ke ASEAN	54,979.9	69,938.8	59,700.8	184,619.5	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: ASEAN FDI *Statistic Database*, 2009

2.3 Dualisme Kepemimpinan Jepang dan China

Berbagai peran Jepang di ASEAN bertujuan untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Kontribusinya memajukan perekonomian di negara-negara ASEAN melalui Perdagangan, ODA dan FDI, menjadikan tingkat pertumbuhan ASEAN mengalami perkembangan yang luar biasa dan menjadi kawasan yang subur bagi investasi asing. Ajaran *Developmental State* yang banyak ditiru oleh

negara-negara Asia juga menjadikan Jepang punya posisi penting dari berhasilnya pembangunan ekonomi Asia tersebut.

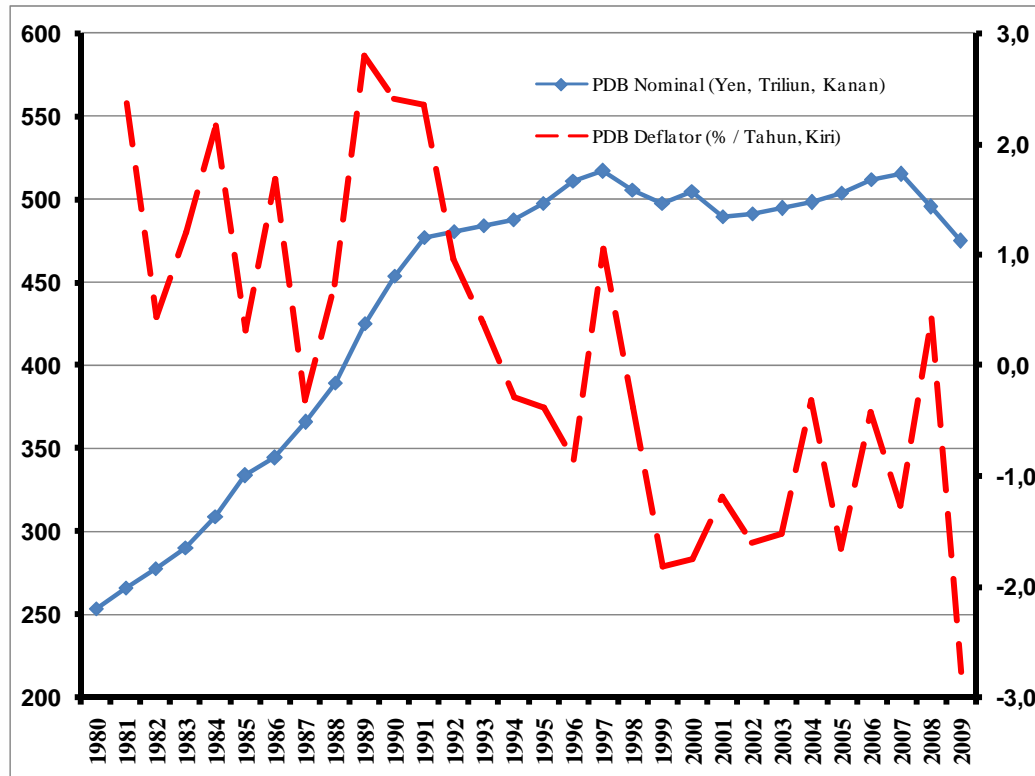
Bahkan, keberhasilan model pembangunan ekonomi Asia ini sering dideskripsikan sebagai formasi angsa terbang “*flying geese*”, dimana Jepang menempati posisi terdepan yang memimpin perekonomian Asia melalui pemberian modal, transfer pengetahuan teknologi dan managerial. Akan tetapi, kejadian krisis berkepanjangan di Jepang menjadi tahap awal dari masa-masa sulit Jepang untuk mempertahankan predikatnya sebagai pemimpin Asia.

Pada awal 1990-an, Jepang yang selama ini menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi luar mengalami penurunan kinerja ekonomi. Pertumbuhan PDB Jepang menurun, terjadi deflasi dan permasalahan kredit macet sektor finansial di Jepang (sebagai dampak dari deflasi).

Fenomena deflasi bisa dilihat dari stagnasi pertumbuhan PDB Nominal dan perkembangan Indeks Harga PDB (deflator). Pada tahun 1980-an sampai 1991, PDB Nominal Jepang rata-rata tumbuh 6% per tahun. Namun, memasuki periode 1992 sampai 1994, PDB Nominal Jepang tumbuh kurang dari 1% per tahun. Meskipun sempat pulih sesaat di tahun 1995-1996, memasuki 1997 pertumbuhan PDB Nominal kembali melambat dan menjadi negatif sepanjang 1998-2001 bersamaan dengan memuncaknya krisis Asia dan resesi global 2001. Perubahan ekstrim pertumbuhan nominal PDB dari positif sekitar 6% ke negatif terjadi karena menurunnya tingkat harga-harga *output* secara meluas. Dimana PDB deflator dari positif di 1980-an menjadi negatif di era 1990-an. Walaupun produksi riil meningkat, namun tingkat harga menurun lebih cepat, sehingga secara total PDB Nominal menjadi tumbuh negatif (Lihat Grafik 2.2).

Grafik 2.2

PDB Nominal dan PDB Deflator Jepang

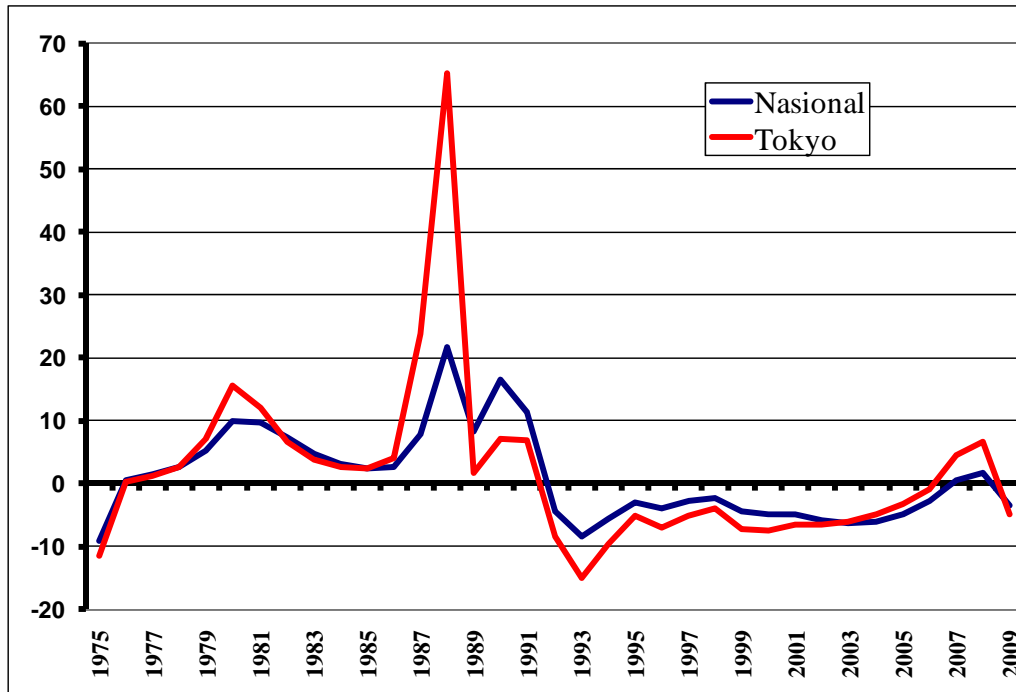


Sumber: Bloomberg, 2010

Terjadinya deflasi juga terlihat dari penurunan harga-harga aset seperti tanah dan saham. Puncak kenaikan harga tanah terjadi pada tahun 1988, dimana harga tanah nasional naik 22% dan tanah di kota Tokyo naik 65%. Sejalan dengan pecahnya gelembung aset, harga tanah di seluruh Jepang (khususnya Tokyo) mengalami penurunan drastis sepanjang 1992-2006 (Lihat Grafik 2.3).

Grafik 2.3

Perubahan Harga Tanah di Jepang (% per Tahun)

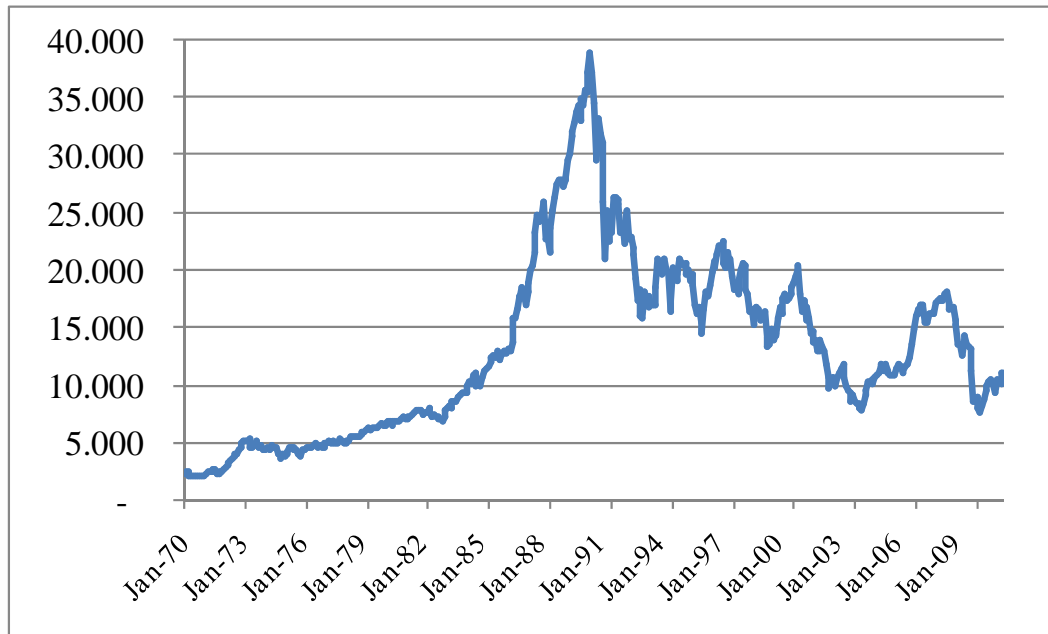


Sumber: Bloomberg, 2010

Selain harga tanah mengalami penurunan secara tajam, harga-harga saham juga menunjukkan penurunan yang drastis. Harga saham berkurang 80% dari titik tertingginya di 38.916 di Desember 1989 menjadi 7.831 di April 2003 (Lihat Grafik 2.4).

Grafik 2.4

Indeks Harga Saham Nikkei Jepang



Sumber: Bloomberg, 2010

Penurunan harga tanah dan harga saham menyebabkan menurunnya kekayaan yang dimiliki masyarakat. Berkurangnya kekayaan masyarakat selanjutnya akan menurunkan permintaan konsumsi nasional sehingga pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Perlambatan ekonomi akan kembali mengurangi pendapatan masyarakat. Efek negatif melingkar ini terus berlanjut dan ekonomi semakin stagnan dan sulit untuk pulih.

Bila pada saat kenaikan harga aset terjadi efek positif (*positive feed back effect*) maka pada saat pecahnya gelembung aset terjadi efek negatif (*negative feed back effect*) sehingga ekonomi sulit mengalami pemulihan.

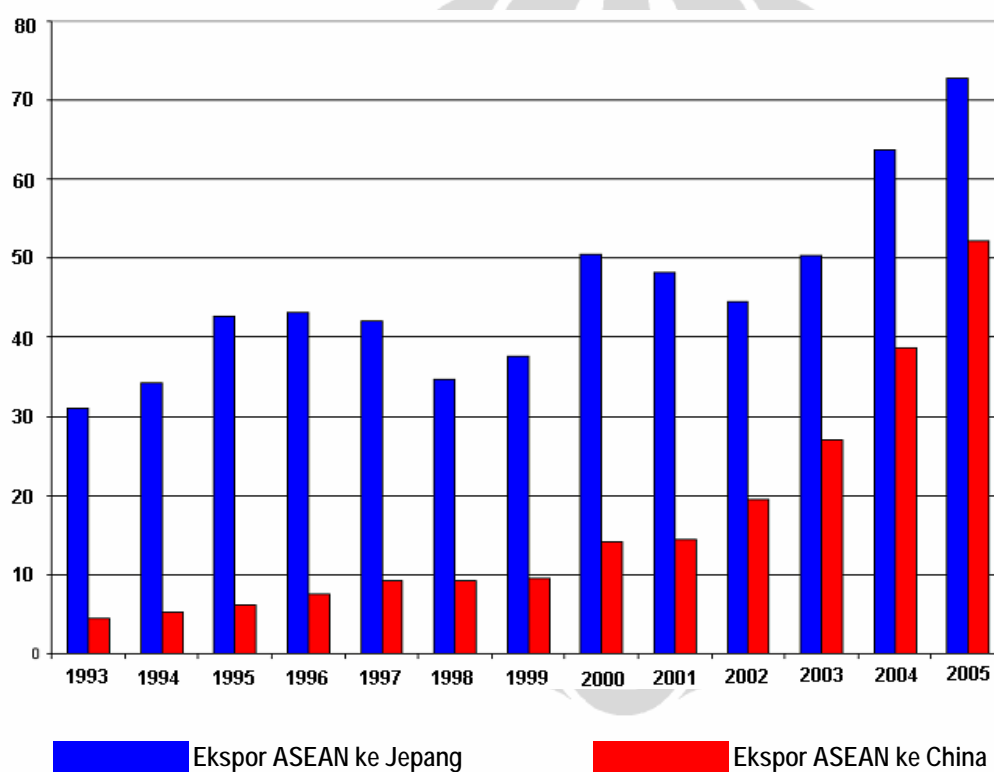
Lesunya perekonomian Jepang memberi kesempatan bagi China untuk dapat memainkan peranannya dan membangun hubungan baik dengan negara-negara ASEAN. Apalagi paska bergabung ke WTO, perekonomian China semakin berkembang pesat. China semakin aktif melakukan hubungan dagang dengan ASEAN.

Peningkatan peran China dalam ekonomi ASEAN terlihat dari peningkatan perdagangan (ekspor dan impor). China dengan cepat menyusul Jepang yang selama ini menjadi mitra utama perdagangan ASEAN (Lihat Grafik 2.5 dan 2.6).¹⁶

Grafik 2.5

Ekspor ASEAN ke Jepang dan China

(dalam US\$ Miliar)

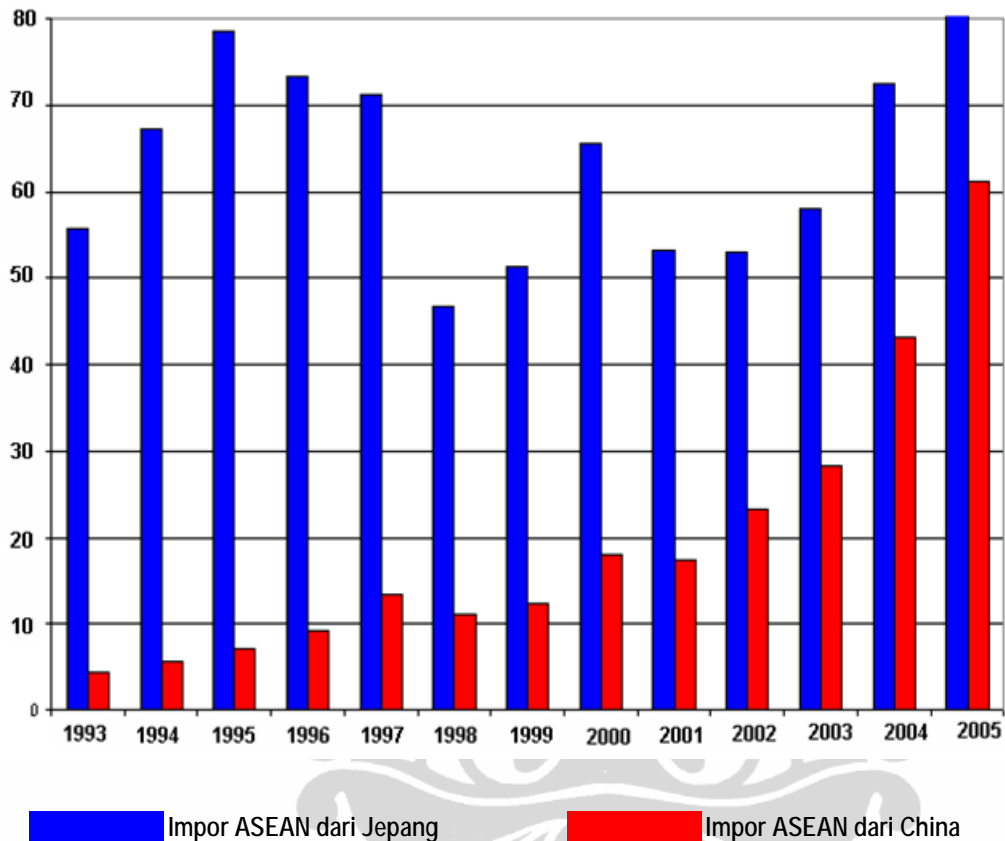


¹⁶ Larima Varma, "Japan's Policy Towards East and Southeast Asia: Trends in Re-Asianization, *International Studies*, Vo. 43, No. 33, 2006, hlm 44.

Grafik 2.6

Impor ASEAN dari Jepang dan China

(dalam US\$ Miliar)



Sumber: Guo Gang, 2000

Kebangkitan ekonomi China menimbulkan *dualisme* kepemimpinan ekonomi Asia yang selama ini didominasi Jepang. Dengan pertumbuhan ekonomi mendekati rata-rata 10% per tahun sepanjang periode 1990-2007, China berhasil menduduki peringkat ketiga ekonomi terbesar dunia dari besaran PDB nominal.¹⁷

Pada tahun 2008, China menunjukkan kekuatan ekonominya, sementara perekonomian Jepang lemah. PDB nominal China mencapai US\$4,3 triliun, hampir mengimbangi PDB Jepang US\$4,9 triliun. Bahkan, cadangan devisa yang

¹⁷ Guo Gang, "China-Japan-ASEAN Relations", lecture notes presentation di The University of Mississippi, 2007. <http://www.olemiss.edu/courses/pol387/> (Diunduh pada 17 Mei 2009).

dimiliki China sebesar US\$1,9 triliun, hampir dua kali lipat dari cadangan devisa Jepang, US\$1,0 triliun.

ASEAN memanfaatkan kebangkitan ekonomi China dengan menjaga hubungan baiknya dengan Jepang. Karena, bagaimanapun juga harus ada kekuatan yang mampu menyeimbangi kemunculan China sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia.

Jepang sendiri menanggapi peningkatan peran China di ASEAN dengan cara lebih aktif mengikuti setiap kegiatan bersama ASEAN. Seperti melakukan kerjasama kebudayaan dan peningkatan dialog pejabat tinggi negara untuk menghadapi tantangan global, serta aktif terlibat dalam proses perdamaian. Partisipasi Jepang dalam mengatasi konflik internal maupun keamanan manusia (*human security*) di Asia Tenggara sangat besar, bahkan yang terbesar.¹⁸ Dapat dilihat dari keaktifan Jepang dalam *peace making* di Aceh dan Kamboja, *peace building* di Timor Timur, Aceh dan Mindanao (Filipina). Bahkan Jepang juga berusaha membantu negara ASEAN memerangi bajak laut di sekitar lautan Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka untuk menunjukkan keaktifannya dalam aspek keamanan.

Adanya persaingan antara Jepang-China dalam membina hubungan dengan ASEAN tidak harus diartikan sebagai kompetisi yang negatif. Karena hubungan Jepang-China dalam konteks ASEAN lebih kepada saling melengkapi (*complementary*), khususnya dalam upaya mempercepat proses integrasi ekonomi regional. Bila ada persaingan antara Jepang-China, lebih dalam bentuk perdebatan konsep dan ideologi tentang visi masa depan komunitas Asia Timur dimasa mendatang. Bila pada awal proses industrialisasi Asia Jepang menjadi pemimpin strategi pembangunan ekonomi, maka pada masa sekarang posisi Jepang bergeser

¹⁸ Lam Peng Er, "Japan's Human Security Role in Southeast Asia", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 28, No. 1, 2006, hlm 141.

menjadi mitra sejajar negara-negara Asia guna merealisasikan *East Asian Community*.¹⁹

2.4 Perjalanan Regionalisme Asia

Meskipun ASEAN selama ini banyak dilibatkan dalam suatu kerjasama dengan Jepang maupun China, tetapi belum tumbuh kesadaran bagi masing-masing negara untuk menggabungkan kekuatan besar berbasis regional dalam suatu kerangka institusional.

Bahkan, sejak ASEAN didirikan, belum ada kesepakatan yang mengarah kepada inisiatif mengintegrasikan ASEAN dengan negara-negara tetangganya. Padahal, kawasan lain seperti Amerika dan Eropa telah menunjukkan kelanjutan dari rancangan pembentukan kerjasama perdagangan Amerika *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan integrasi *Eropean Union* (EU).

ASEAN lebih tertarik untuk bergabung dalam kerjasama terbuka (*open regionalism*) seperti *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC). Dengan bergabung ke dalam forum APEC, maka negara-negara ASEAN yang berorientasi ekspor mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara diluar kawasan Asia yang tergabung menjadi anggota APEC.²⁰

Adanya APEC menjadikan sebagian besar negara ASEAN tidak begitu merespon usulan Perdana Menteri Mahathir Muhammad untuk membentuk suatu kerjasama Asia Timur. Mahathir mengajukan proposal *East Asia Economic Group* (EAEG) sebagai blok perdagangan regional di Asia pada tahun 1990-an. Munculnya ide ini merupakan bentuk kekhawatiran Mahathir terhadap perekonomian regional yang semakin didominasi Barat. Untuk itulah Mahathir

¹⁹ Lihat SoeyaYoshihide, "An East Asian Community and Japan-ASEAN Relations", Keynote speech untuk Japan-ASEAN Dialogue ke-7, Tokyo, 2008. <http://www.gfj.jp/eng.htm> (diunduh pada 17 Mei 2009)

²⁰ Leszek Buszynski, "ASEAN's New Challenges", *Pacific Affairs*, Vol. 70, No. 4, 1997-1998, hlm 566

merasa perlu untuk membuat suatu kerjasama regional yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang dari NAFTA maupun Uni Eropa.²¹

Dalam proposal EAEG, negara-negara yang akan dilibatkan terdiri dari enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam), Jepang, China, Taiwan, Hongkong, dan Vietnam²². Sayangnya, semua negara tersebut tidak seluruhnya mendukung pembentukan EAEG. Adanya penentangan AS menjadi salah satu kendala bagi negara-negara tersebut untuk mewujudkan EAEG.

Jepang pada dasarnya memandang EAEG sebagai peluang untuk memperkuat hubungan dagangnya dengan negara-negara Asia, akan tetapi Jepang terbentur oleh kebijakan luar negerinya yang mengharuskan Jepang untuk menjaga hubungan baik dengan AS. Akhirnya Jepang ikut menolak proposal EAEG.

Meskipun Mahathir kemudian mengubah kerangka EAEG menjadi *East Asia Economic Caucus* (EAEC), respon AS tetap tidak berubah. Dalam pandangan AS, kemunculan EAEC dianggap akan menjadi penghambat bagi pelaksanaan APEC yang telah dirancang sebagai forum kerjasama regional negara Asia Pasific sejak tahun 1989.

Kesulitan yang dihadapi dalam menyukseskan pembentukan EAEG maupun EAEC dapat dilihat dari dua aspek: **Pertama**, target yang ingin dicapai dari pembentukan proposal tersebut tidak jelas. Sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa proposal tersebut merupakan bentuk perlawanan Mahathir terhadap AS. **Kedua**, mengingat AS selama ini telah menjadi salah satu mitra penting ASEAN dalam perdagangan, sumber FDI, dan transfer teknologi,

²¹ *Ibid*, hlm 567

²² Pada saat pengajuan proposal tersebut, ASEAN baru terdiri dari enam negara, perekonomian Jepang masih berada dipuncak kejayaan dan China belum menjadi anggota APEC.

pembuat kebijakan di ASEAN tidak mau mengambil resiko melawan keputusan AS yang menolak EAEG maupun EAEC.²³

Kegagalan merealisasikan EAEG/EAEC merupakan suatu bukti masih kurangnya perhatian negara-negara Asia terhadap pembentukan kerjasama regional. Mereka lebih mengandalkan forum kerjasama APEC yang sejak awal rencana pembentukannya begitu menyedot perhatian. APEC yang melibatkan negara-negara di tiga benua (Asia, Amerika, dan Australia) merupakan peluang emas bagi negara-negara Asia memperluas hubungan perdagangan yang akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonominya.²⁴

Namun demikian, sejak APEC mulai berjalan pada tahun 1993, perkembangan APEC justru semakin dominan dimainkan oleh AS, Australia, dan Kanada. Sedangkan negara-negara Asia mendapatkan komposisi yang sangat kecil.

Adanya keinginan sepihak AS yang memaksakan nilai-nilai liberalisme dalam tubuh APEC menjadi kendala utama yang tak terhindarkan. Saat berlangsungnya deklarasi Bogor pada tahun 1994, pemerintah AS menyatakan pentingnya memasukkan nilai-nilai liberalisme pada APEC. Walaupun Filipina dan Korea Selatan tidak begitu mempermasalahkannya, tetapi banyak negara Asia lain yang keberatan dengan penerapan tersebut. Bagaimanapun juga negara-negara Asia lebih menginginkan APEC sebagai forum yang memfasilitasi kerjasama pemerintah dalam pembangunan antar negara.²⁵

Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan perpecahan dalam APEC dan memperlihatkan kegagalan APEC mengakomodasi kepentingan pihak Asia

²³ Kai He, "Institutionalism Balancing in International Relations Theory; Economic Interdependence and Balance of Power Strategy in Southeast Asia", *European Journal of International Relations*, Vol. 14, No. 3, 2008, hlm 506.

²⁴ Richards Stubbs, "ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism", *ASEAN Survey*, Vol. 42, No. 3, 2002, hlm 442.

²⁵ Yong Wook Lee, "Regional Financial Solidarity Without the United States: Contested Neoliberalism in East Asia", *EAI Asia Security Initiative Working Paper 1*, Korea University, 2009, hlm 8.

maupun Barat.²⁶ Menghadapi kenyataan ini, negara-negara Asia kemudian menggerakkan kembali ide pemikiran Perdana Menteri Mahathir Muhammad untuk membentuk suatu kerjasama regional yang sifatnya *exclusive*, yakni terbatas pada negara-negara Asia saja.

Keinginan untuk membentuk kerjasama regional yang sifatnya *exclusive* mencapai momentumnya saat krisis 1998 menyerang sebagian besar negara di kawasan Asia. Respon Jepang sangat cepat dalam mengupayakan bentuk penyelamatan krisis Asia. Salah satu usulannya adalah membentuk kerjasama finansial regional *Asian Monetary Fund* (AMF).

Proposal AMF sebelumnya pernah diwacanakan dalam kerangka *Asian Monetary Organization* (AMO). AMO merupakan usulan Toyoo Gyohten, seorang mantan Wakil Menteri bidang keuangan (*Vice Minister for Finance*) yang memanfaatkan masa pensiunnya dengan bekerja pada lembaga penelitian swasta *the Institute for International Monetary Affairs* (IIMA). Usulan ini merupakan bentuk respon Gyohten saat AS dan IMF memberikan program bantuan dalam mengatasi krisis Meksiko 1995. Menurut Gyohten, Asia perlu memiliki sebuah institusi moneter. untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis seperti di Meksiko. Apalagi, AS maupun IMF diperkirakan tidak akan bersikap responsif terhadap Asia jika dibandingkan apa yang dilakukan AS dan IMF di Meksiko.²⁷

Selama di IIMA, Gyohten memanfaatkan pengaruhnya dan jaringan mitranya sewaktu bekerja di MOF untuk mengadakan pertemuan pejabat bank sentral di wilayah Asia. Gyohten mengajak teman baiknya Haruhiko Kuroda untuk merancang pembentukan institusi moneter seperti yang direncanakan Gyohten. Haruhiko Kuroda yang merupakan pejabat biro kementerian keuangan

²⁶ Mark Berger, "APEC and Its Enemies: The Failure of the New Regionalism in The Asia-Pacific", *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 5. Dikutip oleh *Op Cit*, hlm 9.

²⁷ Lihat: Phillip Y Lipcy, "Japan's Asian Monetary Fund proposal", *Standford Journal of East Asian Affairs*, Vol 3, No. 1, 2003, hlm 95-96, mengutip dari Eisuke Sakakibara, *Nihon to Sekai ga Furueta Hi (The Day that Rocked Japan and the World)*. Tokyo: Chuo Koron Shinsha, 2000, hlm 94.

bagian internasional (*Ministry's International Finance Bureau*) kemudian memformulasikan suatu bentuk kerjasama finansial regional Asia.²⁸

Baik Gyohten maupun Kuroda sebenarnya telah merancang untuk mengajukan usulan kerjasama ini dalam pertemuan ADB pada awal tahun 1997. Namun, dikarenakan adanya suatu masalah internal, usulan ini menjadi batal untuk dilakukan. Jepang menjadi kehilangan momentum untuk menyuarakan aspirasinya.²⁹

Ketika krisis Asia mulai menyerang negara-negara Asia sejak pertengahan tahun 1997, Jepang mendapatkan kembali momentumnya untuk mengajukan inisiatif kerjasama regional yang sempat tertunda tersebut. Tujuan Jepang selain membantu negara-negara Asia mengatasi permasalahan krisis juga untuk menjaga stabilitas finansial regional. Pada bab selanjutnya akan membahas peran Jepang dalam mewujudkan kerjasama finansial regional di Asia, mulai dari upaya pembentukan AMF, sampai kepada keberhasilan pembentukan format baru kerjasama finansial regional dalam kerangka CMI.

²⁸ Lihat "Moving Beyond Bilateralism: Japan and the Asian Monetary Fund", *Pacific Economic Papers*, No. 331, 2002, hlm 5 dan Lipcy, hlm 94

²⁹ Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, dan Hugo Dobson, "Japan and the East Asian Financial Crisis: Patterns, Motivations, and Instrumentalisation of Japanese Regional Economic Diplomacy", University of Warwick, United Kingdom, 2002, hlm 9.